



PEMERINTAH KOTA BANDUNG
SEKRETARIAT DAERAH

JALAN WASTUKANCANA NO. 2 Telp. 432338 – 432339 – 432369 – 432370 BANDUNG

SALINAN
KEPUTUSAN WALIKOTA BANDUNG
NOMOR: 050/Kep.249-Bappelitbang/2023
TENTANG
PEKERJAAN STRATEGIS KOTA BANDUNG TAHUN 2023

WALI KOTA BANDUNG,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pencapaian target perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Bandung Tahun 2018-2023, diperlukan penyusunan pekerjaan strategis kota Bandung Tahun 2023;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Wali Kota tentang Pekerjaan Strategis Kota Bandung Tahun 2023;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur, Djawa Tengah, Djawa Barat dan Dalam Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 45) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1954 tentang Pengubahan Undang-Undang Nomor 16 dan Nomor 17 Tahun 1950 (Republik Indonesia Dahulu) tentang Pembentukan Kota-kota Besar dan Kota-kota Kecil di Djawa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 551);

2. Undang-Undang ...

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
3. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan Tata Cara Penyusunan Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);

6. Peraturan ...

6. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6042);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
9. Peraturan Presiden Nomor 45 Tahun 2018 tentang Rencana Tata Ruang Kawasan Perkotaan Cekungan Bandung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 91);
10. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020–2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
11. Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 136);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1321);

13. Peraturan ...

13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 100 Tahun 2018 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1540);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodifikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2020 tentang Pengutamaan Penggunaan Alokasi Anggaran untuk Kegiatan Tertentu, Perubahan Alokasi, dan Penggunaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 581) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 26 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2020 tentang Pengutamaan Penggunaan Alokasi Anggaran untuk Kegiatan Tertentu, Perubahan Alokasi, dan Penggunaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 910);

18. Peraturan ...

18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1419);
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 81 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2023 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 590);
20. Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2022 tentang Rancangan Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2023 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 505);
21. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 07 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan serta Musyawarah Perencanaan Pembangunan Daerah (Lembaran Daerah Kota Bandung Tahun 2008 Nomor 07);
22. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 08 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kota Bandung Tahun 2008 Nomor 08);
23. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 08 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Bandung (Lembaran Daerah Kota Bandung Tahun 2016 Nomor 08) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 3 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 08 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Bandung (Lembaran Daerah Kota Bandung Tahun 2021 Nomor 3);

24. Peraturan ...

24. Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2019 tentang RPJMD Tahun 2018-2023 (Lembaran Daerah Kota Bandung Tahun 2019 Nomor 3) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 11 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2019 tentang RPJMD Tahun 2018-2023 (Lembaran Daerah Kota Bandung Tahun 2021 Nomor 11);
25. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 5 Tahun 2022 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Bandung Tahun 2022-2042 (Lembaran Daerah Kota Bandung Tahun 2022 Nomor 5);
26. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 7 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Lembaran Daerah Kota Bandung Tahun 2022 Nomor 7);
27. Peraturan Wali Kota Bandung Nomor 89 Tahun 2022 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2023 (Berita Daerah Kota Bandung Tahun 2022 Nomor 89);

Memperhatikan : Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :
- KESATU : Pekerjaan Strategis Pembangunan Kota Bandung Tahun 2023.
- KEDUA : Pekerjaan Strategis Pembangunan Kota Bandung Tahun 2023 sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU, tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Wali Kota ini.

KETIGA ...

- KETIGA : Biaya pelaksanaan Keputusan Wali Kota ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Bandung Tahun Anggaran 2023.
- KEEMPAT : Keputusan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bandung
pada tanggal 9 Februari 2023
WALI KOTA BANDUNG,
TTD.
YANA MULYANA

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
PADA SEKRETARIAT DAERAH KOTA BANDUNG,



SANTOSA LUKMAN ARIEF, SH
Penata Tingkat I
NIP. 19760604 200602 1 002

Tembusan, Salinan Keputusan ini disampaikan Kepada Yth:

1. Gubernur Jawa Barat;
2. Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Bandung;
3. Forum Komunikasi Pimpinan Daerah Kota Bandung;
4. Para Asisten di Lingkungan Sekretaris Daerah Kota Bandung;
5. Inspektur Kota Bandung;
6. Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Bandung;
7. Para Kepala Badan, Dinas, Kantor di Lingkungan Pemerintah Kota Bandung;
8. Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kota Bandung;
9. Para Kepala Bagian di Lingkungan Pemerintah Kota Bandung;
10. Para Direktur Utama Perusahaan Umum Daerah se-Kota Bandung;
11. Para Camat se-Kota Bandung;
12. Para Lurah se-Kota Bandung.

Daftar Rancangan Usulan Proyek Strategis Kota Bandung Tahun 2023

NO	PERANGKAT DAERAH	SUB KEGIATAN	RINCIAN PEKERJAAN	ALOKASI ANGGARAN	ASPEK PERENCANAAN (SASARAN STRATEGIS RPJMD)
1	Sekretariat Daerah Kota Bandung	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	1 Pembangunan Gedung Kantor Bappelitbang (Jasa Konsultansi dan Pembangunan Fisik)	14.000.000.000	Indeks Reformasi Birokrasi
2	Dinas Pendidikan	Penambahan Ruang Kelas Baru	2 SDN 090 Cibiru	4.503.132.000	Angka Rata-Rata Lama Sekolah dan Harapan Lama Sekolah
		Pengadaan Perlengkapan Siswa	3 Penyediaan seragam dan tas sekolah bagi Peserta Didik Rawan Melanjutkan Pendidikan pada SMP Negeri dan Swasta	17.901.675.000	Angka Rata-Rata Lama Sekolah dan Harapan Lama Sekolah
			4 Penyediaan seragam dan tas sekolah bagi Peserta Didik Rawan Melanjutkan Pendidikan pada SD Negeri dan Swasta	32.124.525.000	Angka Rata-Rata Lama Sekolah dan Harapan Lama Sekolah
3	Dinas Kesehatan	Pembangunan Puskesmas	5 Pembangunan Gedung UPT Puskesmas Cipamokolan	7.718.350.000	Umur Harapan Hidup
			6 Pembangunan Gedung UPT Puskesmas Ahmad Yani	3.891.500.000	Umur Harapan Hidup
			7 Pembangunan Gedung UPT Puskesmas Cibuntu	4.452.000.000	Umur Harapan Hidup
			8 Pembangunan Gedung UPT Puskesmas Cilengkrang	3.952.000.000	Umur Harapan Hidup
			9 Pembangunan Gedung UPT Puskesmas Ledeng	3.891.500.000	Umur Harapan Hidup

NO	PERANGKAT DAERAH	SUB KEGIATAN	RINCIAN PEKERJAAN	ALOKASI ANGGARAN	ASPEK PERENCANAAN (SASARAN STRATEGIS RPJMD)	
			10	Pembangunan Gedung UPT Puskesmas Panghegar	4.238.100.000	Umur Harapan Hidup
			11	Pembangunan Gedung UPT Puskesmas Astanaanyar	3.952.000.000	Umur Harapan Hidup
			12	Pembangunan Gedung UPT Puskesmas Cibolerang	6.752.000.000	Umur Harapan Hidup
		Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	13	Belanja Modal Pembangunan Gedung Kantor UPTD Laboratorium Kesehatan	3.732.421.767	Umur Harapan Hidup
4	Dinas Sumber Daya Air dan Bina Marga	Pembangunan polder/kolam retensi	14	Kolam Retensi Margahayu	7.130.000.000	Persentase Penurunan Titik Genangan
		Pembangunan Stasiun Pompa Banjir	15	Pembangunan Rumah Pompa Cibaduyut, Pasirkoja dan Leuwi Panjang	6.675.706.917	Persentase Penurunan Titik Genangan
		Rehabilitasi tanggul sungai	16	Normalisasi Sungai Cipamulihan	2.500.000.000	Persentase Penurunan Titik Genangan
		Pemeliharaan berkala jalan	17	Pemeliharaan Berkala Jalan:	7.059.760.315	Persentase penurunan kemacetan / Tingkat kemantapan jalan
				- Jl. Mohammad Toha		
				- Jl. Jawa		
				- Jl. Merdeka		
				- Jl. Gegerkalong Hilir		
		Pembangunan Jembatan	18	Pembangunan Jembatan - Jl. Inspeksi Cidurian - Jl. Merkuri Tengah	1.397.463.000	Persentase penurunan kemacetan / Tingkat kemantapan jalan
		Rehabilitasi Jembatan	19	Rehabilitasi Jembatan - Lanscape Skywalk 2 Cihampelas	2.979.314.100	Persentase penurunan kemacetan / Tingkat kemantapan jalan

NO	PERANGKAT DAERAH	SUB KEGIATAN	RINCIAN PEKERJAAN	ALOKASI ANGGARAN	ASPEK PERENCANAAN (SASARAN STRATEGIS RPJMD)	
		Rehabilitasi jalan	20	Pembangunan Trotoar	11.400.000.000	Janji Wali Kota – Fasilitas Disabilitas di Semua Ruang Publik
				- Jl. Pasirkaliki (segmen Jl. Djunjungan sd. Jl. Pajajaran)		
				- Jl. Gatot Subroto (segmen Jl. Turangga sd. Jl. Ibrahim Adji)		
				- Jl. Cihampelas (segmen Jl. Lamping sd. Jl. Pelesiran dan Jl. Prof. Eyckman)		
				- Jl. Cihampelas (segmen Jl. Pelesiran dan Jl. Prof. Eyckman sd. Jl. Pasteur)		
5	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman	Pembangunan Rumah Khusus beserta PSU bagi Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota	21	Pembangunan Apartemen Rakyat Rancacili Cross I Tahap 3	34.309.829.000	Persentase Luasan Kawasan Kumuh
			22	Optimalisasi Pembangunan Apartemen Rakyat Rumah Deret Tamansari	6.470.300.000	Persentase Luasan Kawasan Kumuh
			23	Pembangunan Infrastruktur Apartemen Rakyat Rumah Deret Tamansari	5.950.700.000	Persentase Luasan Kawasan Kumuh
6	Dinas Tenaga Kerja	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	24	Belanja Modal Bangunan Gedung Kantor	15.939.659.940	Tingkat Pengangguran Terbuka
7	Dinas Perhubungan	Pembangunan Prasarana Jalan Kabupaten/Kota	25	Pembangunan Jembatan Penyebrangan Orang (JPO)	1.398.507.426	Persentase Penurunan Kemacetan
		Rehabilitasi dan Pemeliharaan Perlengkapan Jalan	26	Pembangunan Alat Pengendali Isyarat Lalu Lintas (APILL) lokasi 1 dan lokasi 2	1.485.974.794	Persentase Penurunan Kemacetan

NO	PERANGKAT DAERAH	SUB KEGIATAN	RINCIAN PEKERJAAN		ALOKASI ANGGARAN	ASPEK PERENCANAAN (SASARAN STRATEGIS RPJMD)
8	Dinas Lingkungan Hidup	Pengelolaan Taman Keanekaragaman Hayati di Luar Kawasan Hutan	27	Pembangunan Taman Keanekaragaman Hayati di RW. 04 Kp. Cigagak Kelurahan Palasari Kecamatan Cibiru Kota Bandung	4.648.380.750	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup
9	Badan Keuangan dan Aset Daerah	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya (Gudang)	28	Pengadaan Gudang BKAD	3.320.676.000	Indeks Reformasi Birokrasi
		Pengamanan Barang Milik Daerah	29	Pemagaran Aset Pemerintah Kota Bandung di Kelurahan Babakan Sari	1.581.432.365	Indeks Reformasi Birokrasi
10	Kecamatan Kiaracondong	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	30	Pembangunan Gedung Kantor Kecamatan Kiaracondong	9.235.200.000	Peningkatan Kualitas Layanan Publik
11	Kecamatan Sumur Bandung, Kelurahan Merdeka	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	31	Pembangunan Gedung Kantor Kelurahan Merdeka	5.014.734.641	Peningkatan Kualitas Layanan Publik
12	Kecamatan Andir, Kelurahan Dungus Cariang	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	32	Pembangunan Gedung Kantor Kelurahan Dungus Cariang	2.652.552.000	Peningkatan Kualitas Layanan Publik
13	Kecamatan Babakan Ciparay, Kelurahan Margahayu Utara	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	33	Pembangunan Gedung Kantor Kelurahan Margahayu Utara	3.043.968.000	Peningkatan Kualitas Layanan Publik
14	Kecamatan Buahbatu, Kelurahan Cijawura	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	34	Pembangunan Gedung Kantor Kelurahan Cijawura	2.500.077.290	Peningkatan Kualitas Layanan Publik
15	Kecamatan Bandung Kidul, Kelurahan Batununggal	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	35	Pembangunan Gedung Kantor Kelurahan Batununggal	3.323.262.000	Peningkatan Kualitas Layanan Publik
16	Kecamatan Bandung Kulon, Kelurahan Cigondewah Kaler	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	36	Pembangunan Gedung Kantor Kelurahan Cigondewah Kaler	1.495.411.092	Peningkatan Kualitas Layanan Publik

NO	PERANGKAT DAERAH	SUB KEGIATAN	RINCIAN PEKERJAAN	ALOKASI ANGGARAN	ASPEK PERENCANAAN (SASARAN STRATEGIS RPJMD)
17	Kecamatan Bojongloa Kaler, Kelurahan Babakan Asih	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	37 Pembangunan Gedung Kantor Kelurahan Babakan Asih	1.974.456.000	Peningkatan Kualitas Layanan Publik
18	Kecamatan Cibeunying Kaler, Kelurahan Sukamaju	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	38 Pembangunan Gedung Kantor Kelurahan Sukamaju	2.518.179.300	Peningkatan Kualitas Layanan Publik
19	Kecamatan Cicendo, Kelurahan Pasir Kaliki	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	39 Pembangunan Gedung Kantor Kelurahan Pasir Kaliki	2.969.237.790	Peningkatan Kualitas Layanan Publik
20	Kecamatan Cicendo, Kelurahan Pajajaran	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	40 Pembangunan Gedung Kantor Kelurahan Pajajaran	2.569.981.846	Peningkatan Kualitas Layanan Publik
21	Kecamatan Cinambo, Kelurahan Sukamulya	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	41 Pembangunan Gedung Kantor Kelurahan Sukamulya	2.177.810.010	Peningkatan Kualitas Layanan Publik
22	Kecamatan Coblong, Kelurahan Dago	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	42 Pembangunan Gedung Kantor Kelurahan Dago	3.259.796.940	Peningkatan Kualitas Layanan Publik
23	Kecamatan Gedebage, Kelurahan Cisaranten Kidul	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	43 Pembangunan Gedung Kantor Kelurahan Cisaranten Kidul	3.803.889.703	Peningkatan Kualitas Layanan Publik
24	Kecamatan Mandalajati, Kelurahan Jatihandap	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	44 Pembangunan Gedung Kantor Kelurahan Jatihandap	1.195.443.360	Peningkatan Kualitas Layanan Publik
25	Kecamatan Panyileukan, Kelurahan Cipadung Kidul	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	45 Pembangunan Gedung Kantor Kelurahan Cipadung Kidul	2.343.420.000	Peningkatan Kualitas Layanan Publik
26	Kecamatan Regol, Kelurahan Cigereleng	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	46 Pembangunan Gedung Kantor Kelurahan Cigereleng	2.512.944.000	Peningkatan Kualitas Layanan Publik

NO	PERANGKAT DAERAH	SUB KEGIATAN	RINCIAN PEKERJAAN	ALOKASI ANGGARAN	ASPEK PERENCANAAN (SASARAN STRATEGIS RPJMD)
27	Kecamatan Sukajadi, Kelurahan Pasteur	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	47 Pembangunan Gedung Kantor Kelurahan Pasteur	3.132.680.828	Peningkatan Kualitas Layanan Publik
28	Kecamatan Ujungberung, Kelurahan Pasangrahan	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	48 Pembangunan Gedung Kantor Kelurahan Pasangrahan	2.143.980.000	Peningkatan Kualitas Layanan Publik
			TOTAL	283.223.933.174	

WALI KOTA BANDUNG,
TTD.
YANA MULYANA

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
PADA SEKRETARIAT DAERAH KOTA BANDUNG,



SANTOSA LUKMAN ARIEF, SH
Penata Tingkat I
NIP. 19760604 200602 1 002